

Daftar Pustaka

Buku:

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta. 1984.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987.
- Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga 2012.
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003.
- Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Lobby Loqman, *praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- M. Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistemastis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Marjono Reksodiputro, *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring Hukum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Human Right Law), dalam Hak Asasi Manusia dan*

- Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universita Indonesia, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan ke III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2018.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prandya Paramitha, 1980.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*: Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974.

Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Ariana, I Nengah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Didasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016”, *UNNES Law Review*, no 1 (September 2022).

Debby Natalia Ang, “*Tinjauan Yuridis Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Lex Crimen, Vol 4, No. 1, 2015.

Dewi, Ni Putu Cempaka Sintya, Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021).

Fitri, Sheila Maulida, “Urgensi Pengaturan Alat Pembuktian Elektronik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum”, *Amnesti Jurnal Hukum*, no.1 (Februari 2020).

Khristanto, *Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol.6 No.2, (2020).

Michael Barama Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 8, Juni 2016

Muhammad Arif Setiawan, 1996, Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan), Tesis, Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nikychoy Synster, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://sastranikychoysynyster.blogspot.co.id/2014/11/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html> , diakses pada tanggal 12 agustus 2025

Yenny, A. S., Charlyna S. Purba, And Lipi Lipi. "Kedudukan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).

Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Volume 5, Nomor 2 (2016).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20 PUU-XIV/2016